

Pengendalian Akses Internet

Didi Achjari
Staf pengajar FE - UGM

Abstraksi

Internet menawarkan berbagai manfaat tapi di sisi lain juga mempunyai potensi dampak negatif baik di lingkup masyarakat, perusahaan atau negara. Untuk mencegah atau minimal mengurangi dampak tersebut, usaha untuk mengendalikan akses internet harus tetap dilakukan meskipun sangat sulit. Ada dua hal yang menyebabkan langkah tersebut sukar dijalankan yaitu sumber daya yang besar dan teknologi yang selalu berkembang. Berdasarkan lingkup pengendalian, ada tiga jenis yaitu: masyarakat/individu, negara dan perusahaan.

Pendahuluan

Banyak hal yang menjadi daya tarik internet. Bagi pemakai perseorangan atau masyarakat, internet bisa menjadi alat komunikasi yang relatif murah dan cepat (via e-mail dan chat). Selain itu juga bisa digunakan untuk memperoleh hiburan dan informasi terbaru berbagai media baik dari dalam maupun luar negeri seperti CNN. Sementara bagi dunia usaha, internet memungkinkan perusahaan melakukan program marketing secara interaktif melalui pembuatan web-site. Selain itu juga menjanjikan kecepatan dan penghematan biaya yang signifikan (Wilder *et al.*, 1998). Juga, dengan mengijinkan pelanggan atau pengguna selain karyawan untuk mengakses informasi dari jaringan *intranet* perusahaan melalui internet, maka bisa dihemat berbagai biaya overhead seperti biaya administrasi. Lebih jauh, internet juga bisa digunakan untuk mendukung program pemberian insentif bagi karyawan (Nolan, 1998).

Meskipun ia menjanjikan begitu banyak manfaat, tapi kalau tidak diimbangi dengan pengendalian yang memadai ia bisa muncul sebagai ancaman untuk masyarakat maupun perusahaan. Usaha untuk mengendalikan akses internet bisa jadi dilakukan dalam lingkup individu/masyarakat, lingkup perusahaan atau lingkup suatu negara.

Dalam hal lingkup keluarga pembatasan akses ini relatif tidak menemui banyak masalah karena terbatasnya pengguna dan jelasnya tanggung jawab terhadap beban biaya yang muncul. Karena itu solusinya juga relatif mudah yaitu dengan menggunakan berbagai perangkat lunak untuk mengendalikan dan memantau akses. Piranti tersebut pada umumnya dipakai untuk memblokir *web-site* yang berisi pesan pornografi atau perjudian.

Fungsi pengendalian dan pemantauan yang mulanya digunakan dalam lingkup keluarga kemudian juga diterapkan dalam lingkup yang lebih luas misal: perusahaan atau bahkan negara. Karena itu dalam bagian selanjutnya yang akan dibahas secara lebih jauh adalah lingkup perusahaan dan negara.

Pengendalian oleh Negara

Karena menyadari bahwa internet bisa berdampak negatif bagi warganya, maka ada negara tertentu seperti: Singapura dan Cina yang berusaha mengendalikan akses internet dengan berbagai cara (Usry *et. al.*, 1997; Zhang, 1997; Tan *et. al.*, 1997). Negara yang cenderung tertutup seperti Cina berusaha melakukan pembatasan dengan alasan ideologi. Dalam hal ini langkah yang dilakukan pemerintah Cina melalui undang-undang internet (*1997 Internet Rules*) adalah menyediakan gerbang informasi (*information gateway*) ke beberapa penyedia jasa internet (*Internet Service Provider* atau *ISP*) yang menjual jasanya ke masyarakat. Melalui gerbang informasi dan beberapa *ISP* inilah Cina dapat melakukan kontrol dan pemantauan dengan relatif lebih mudah. Langkah yang lain adalah melakukan sensor terhadap akses internet misal dengan memblokir alamat web tertentu (Zhang, 1997; Tan *et. al.*, 1997).

Untuk pengawasan terhadap kebijakan pembatasan akses, Cina juga mewajibkan pengguna internet untuk mendaftar di *Ministry of Public Security* dan menandatangani pernyataan untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara,

mengganggu ketertiban umum dan menyebarkan pornografi (Tan *et. al.*, 1997). Adapun bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi yang cukup berat.

Pengendalian oleh Perusahaan

Berdasarkan survey oleh *SurfWatch Software* menunjukkan bahwa 5% sampai 18% pemakaian internet oleh karyawan tidak berkait langsung dengan pekerjaan (Anonymus, 1998). *Web-site* yang banyak dikunjungi antara lain yang berisi investasi, belanja, hiburan, atau pornografi. Bahkan yang ironis mereka juga mengunjungi *web-site* yang berisi informasi lowongan pekerjaan baru pada jam kerja. Jadi mereka mencari pekerjaan baru dengan menggunakan akses internet perusahaan.

Pengawasan perusahaan terhadap akses internet karyawan lebih disebabkan karena kekuatiran adanya (1) Masalah hukum yang mungkin akan timbul berkaitan dengan pemakaian perangkat lunak (software) oleh pihak luar perusahaan dan akses terhadap informasi yang berisi pesan-pesan pornografi dan rasisme (2) Masalah dengan produktifitas (3) Kapasitas saluran informasi (bandwith) yang tersedia (Zerega, 1998; Machlis, 1998). Lebih jauh, dari hasil survey oleh Info World menunjukkan bahwa 76% eksekutif yang disurvei mengatakan bahwa perusahaan mereka menerapkan pemantauan atas akses internet. Sebaliknya 54% *end-user* mengakui akses internetnya dipantau perusahaan.

Dari sisi kinerja, hal ini dikuatirkan bisa mengganggu produktifitas karyawan dan lebih jauh bisa menimbulkan suasana kerja yang kurang nyaman karena adanya pihak yang terganggu. Untuk menghitung kerugian akibat hilangnya produktifitas karena akses internet bisa dilakukan dengan mudah. Misal satu orang karyawan menggunakan waktu satu jam kerja selama sehari untuk akses internet di luar urusan perusahaan dan karyawan tersebut digaji seribu rupiah per jam maka perusahaan rugi seribu rupiah per orang per hari (Zerega, 1998). Jumlah totalnya tinggal mengalikan saja dengan jumlah

karyawan yang ada dan jumlah hari kerjanya. Kerugian itu belum termasuk biaya akses internet yang harus ditanggung perusahaan.

Menurut Zerega (1998), langkah yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah membuat kebijakan tentang pemakaian internet yang jelas dan singkat. Selanjutnya sosialisasikan kebijakan tersebut kepada karyawan agar mereka memahami kalau aturan yang jelas dalam hal akses internet. Karyawan bisa saja diminta untuk menandatangani semacam surat pernyataan untuk mematuhi kebijakan perusahaan. Terakhir adalah penegakan kebijakan dengan memberikan sanksi bagi pelanggar. Segala kebijakan yang dibuat tentunya harus bisa menyajikan komposisi keseimbangan yang tepat antara kebebasan dan kontrol.

Untuk melakukan pemantauan terhadap penggunaan internet dan memblok website tertentu, beberapa alternatif software bisa dipakai seperti: *NetPartners' Websense*, *Spyglass' Surfwatch* dan *Elron's Internet Manager*. Produk-produk tadi bisa dipasang di *firewall*, *proxy server* atau di *stand alone server* (Zerega, 1998). Lebih jauh, ada produk yang bahkan bisa digunakan untuk menghitung biaya yang harus ditanggung perusahaan atas penggunaan internet.

Keuntungan dari pengawasan dan pembatasan akses internet tidak hanya dari sisi produktifitas dan biaya akses tapi juga menyangkut kecepatan akses. Jika semua orang dibiarkan mengakses dan melakukan down-load berbagai informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan dan tidak ada sangkut paut dengan perusahaan maka hal ini akan mengurangi kinerja jaringan (Waltner, 1998). Saluran informasi (*bandwith*) yang dimiliki perusahaan menjadi penuh dan akibatnya kecepatan akses berkurang. Jadi mirip dengan jalan raya, semakin banyak pemakai jalan berada pada waktu yang sama maka akan timbul resiko kemacetan lalu lintas.

Agar kebijakan pengendalian akses internet ini efektif maka kombinasi tindakan yang bersifat administratif melalui regulasi dan tindakan teknis melalui pemasangan

perangkat lunak pendukung. Upaya ini akan menghabiskan banyak sumber daya dan biaya. Dari sisi teknis dengan perkembangan teknologi, peluang untuk melanggar kebijakan tersebut akan selalu ada. Meskipun begitu, penerapan berbagai mekanisme pengendalian dan pemantauan minimal akan menyadarkan karyawan bahwa mereka dipantau. Karena itu diharapkan akan bisa mencegah atau paling tidak mengurangi tingkat pelanggaran.

Simpulan

Meskipun internet menawarkan banyak manfaat tapi potensi dampak negatifnya perlu diantisipasi. Dampak tersebut meliputi penyebaran pornografi, rasisme, terorisme, perjudian dan lain-lain. Upaya untuk mengendalikan dan memantau akses internet bisa dilakukan dalam lingkup masyarakat/individu, perusahaan dan negara. Adapun mekanismenya bisa dilakukan dengan pengendalian secara administrasi maupun dengan menggunakan perangkat lunak (software). Dalam lingkup perusahaan, dengan diterapkannya mekanisme pengendalian dan pemantauan diharapkan dapat mencegah penurunan produktifitas, meningkatkan efektifitas pemasaran, dan memperlancar akses. Dalam lingkup negara, ada yang menggunakan kedua mekanisme di atas dengan pemberian sanksi yang berat bagi pelanggar.

Bibliografi

- Anonymus. 1998. Do you know how your employees are spending their Internet time? [hal. www]. *Managing Office Technology*, 43 (4), Mei, hal. 34. Sumber dari <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)
- Graham, John R. 1998. Controlling the Internet and other fantasies. [hal. www]. *Direct Marketing*, vol. 61 (2), Juni, hal. 26-27. Sumber dari <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)
- Machlis, Sharon. 1998. Web surfing under scrutiny. [hal. www]. *Computerworld*, 32 (39), Juli, hal. 20. Sumber dari <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)
- Nolan, Paul. 1998. The Internet incentive. [hal. www]. *Potentials in Marketing*, vol. 31 (2), Februari, hal. 20. Sumber dari <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)
- Tan, Zixiang. Mueller, Milton. and Foster, Will. 1997. China's new Internet Regulations: Two steps forward, one step back. [hal. www]. *Communication of the ACM*, 40 (12), 19 Des., hal. 11-16. Sumber dari: <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)
- Usry, Mark M. et. al. 1997. Control of the Internet. *Information Management & Computer Security*. 5/1. MCB University Press, hal. 23-28
- Waltner, Charles. 1998. Web watchers. [hal. www]. *Informationweek*, no 679, 27 April, hal. 121-126. Sumber dari <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)
- Wilder, Clinton. Caldwell, Bruce & Dalton, Gregory. 1998. Web incentive. [hal. www]. *Informationweek*, no 690, Juli, hal 18-20 Sumber dari <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)
- Zerega, Blaise. 1998. Policing Internet Usage. [hal. www]. *Infoworld*, 20 (29), Juli, hal. 72-73. Sumber dari <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)
- Zhang, Mo. 1997. China: China issue new rules strengthening regulatory structure over Internet. [hal. www]. *East Asian Executive Report*, 19 (11), 15 November. Sumber dari <http://melba.unilinc.edu.au/ovidweb...&totalCit=1087&D=infofrnt&S=7232002> (diakses 30 November 1998)